

DIFFICULTIES OF EQUALITY EDUCATION IN THE SUMATERA AREA

KESULITAN-KESULITAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI WILAYAH SUMATERA

KOLOKIUUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://kolokium.ppj.unp.ac.id/>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 7, Nomor 1, April 2019

DOI: 10.24036/kolokium-pls.v7i1.19

Wirdatul Aini^{1,2}

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

²Email: wirdatulaini@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the role of Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A, B, and C) in completing the 9-year compulsory education. However, in the implementation of the Kejar Paket there are still many problems faced. The research objective was to describe the difficulty of implementing Kejar Paket in North Sumatra, West Sumatra, and South Sumatra. Expost facto descriptive research type. The population of the study was that all subjects involved in the Kejar Paket were study residents, tutors, managers in three research locations. Samples were taken purposively for each study location. Data collection techniques are interviews, and the tools are interview guidelines. Data is processed in a quantitative descriptive manner. The research findings illustrate the low interest in learning as seen in the presence of learning citizens. Some tutors are recruited from Strata I and graduated from high school, so the learning approach is felt to be incompatible with learning in education outside school. Facilities and infrastructure used to use what is available at the venue for the activities. Some managers have not been so serious in managing learning activities. Learning materials for learning citizens are often too late for the study schedule, so tutors find it difficult to provide material to the learning community. Funding for learning activities is felt to be lacking. The standard of assessment to the learning community is felt to be very high, while the material provided has not supported the achievement of the expected results.

Keywords: Difficulties, Implementation of Education, Equality Education

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran pendidikan kesetaraan kejar paket (A, B, dan C) dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun sangat dirasakan. Namun pada pelaksanaan kejar paket masih banyak permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kesulitan pelaksanaan kejar paket di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Jenis penelitian deskriptif expost facto. Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek yang terlibat dalam pelaksanaan kejar paket adalah warga belajar, tutor, pengelola di tiga lokasi penelitian. Sampel diambil secara purposif untuk masing-masing lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan alatnya adalah pedoman wawancara. Data diolah secara deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menggambarkan rendahnya

minat warga belajar yang terlihat dari kehadiran warga belajar. Pendidikan tutor sebagian direkrut dari Strata I dan SMA, sehingga pendekatan pembelajaran dirasakan belum sesuai dengan pembelajaran pada pendidikan luar sekolah. Sarana dan prasarana yang dipakai menggunakan apa yang tersedia di tempat pelaksanaan kegiatan. Pengelola sebagian belum begitu serius dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Bahan pembelajaran untuk warga belajar sering terlambat dari jadwal belajar, sehingga tutor merasa sulit untuk memberikan materi kepada warga belajar. Pendanaan untuk kegiatan pembelajaran dirasakan masih kurang. Standar penilaian kepada warga belajar dirasakan sangat tinggi, sementara materi yang diberikan belum mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

Kata Kunci: Kesulitan, Pelaksanaan Pendidikan, Pendidikan Kesetaraan

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fasal 1 ayat 1, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara" (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Berdasarkan konsep pendidikan tersebut bahwa pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia baik secara psikologis, maupun secara fisilogis. Pada dasarnya pendidikan sangat berperan penting untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM), dan membentuk karakter bangsa yang mencakup pencapaian pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) untuk membentuk manusia seutuhnya.

Selanjutnya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 fasal 13 ayat 1 menjelaskan untuk memperoleh pendidikan dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal (sekolah), nonformal (luar sekolah), dan informal (keluarga) yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal atau yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti (*replacement*), penambah (*suplement*) dan pelengkap (*komplement*) (Presiden Republik Indonesia, 2003),

Salah satu bentuk satuan pendidikan luar sekolah adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan pada jalur nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan nonformal meliputi: (1) pendidikan kesetaraan Kejar Paket A setara dengan pendidikan SD, (b) pendidikan kesetaraan Kejar Paket B setara dengan pendidikan di SLTP, dan (c) pendidikan kesetaraan Kejar Paket C setara dengan SLTA (Kintamani, 2012; Muljono, 2008).

Pendidikan kesetaraan ini pada dasarnya adalah membantu pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun (pendidikan SD sampai SLTP). Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar hingga saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikan. Untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun peran pendidikan luar sekolah sangat diharapkan, terutama dalam pelaksanaan Kejar Paket A, B, dan C.

Pada artikel ini akan mendeskripsikan temuan penelitian pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Pulau Sumatera. Laporan pelaksanaan penelitian ini mencakup tiga propinsi

sebagai responden, yaitu Propinsi Sumatera Utara sebagai propinsi yang berhasil dalam pelaksanaan kejar Paket A, B dan C, Propinsi Sumatera Barat sebagai daerah termasuk kategori sedang dalam pelaksanaan pendidikan Kesetaraan, (A, B, dan C), dan Propinsi Sumatera Selatan sebagai propinsi agak kurang berhasil dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C). Namun pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan ini banyak hambatan yang ditemui: Tujuan penelitian ini: (1) mendeskripsikan kesulitan-kesulitan pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B dan C) di Sumatera Utara, (2) mendeskripsikan kesulitan-kesulitan pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) di Sumatera Barat, dan (3) mendeskripsikan kesulitan-kesulitan pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) di Sumatera selatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mendapatkan gambaran tentang kesulitan-kesulitan pelaksanaan pendidikan kesetaraan di wilayah Sumatera. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh data guna pembuktian hipotesis, tetapi merupakan suatu usaha yang masih berupa penjajakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah semua daerah yang ada di Sumatera yang melaksanakan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Sampel diambil tiga propinsi di Wilayah Sumatera yang berhasil, sedang dan kurang berhasil dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan, maka ditetapkan tiga propinsi sebagai sampel. Propinsi Sumatera Utara sebagai propinsi yang agak berhasil dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan, Propinsi Sumatera Barat sebagai propinsi yang cukup dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan, dan propinsi Sumatera Selatan sebagai propinsi yang agak kurang berhasil dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah warga belajar, tutor, pengelola, alumni pendidikan kesetaraan. Pengambilan sampel diambil secara purposive untuk masing-masing propinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan alat pengumpulan data panduan wawancara, data data diolah secara deskriptif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) dalam penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan berdasarkan 8 standar pendidikan. Berikut ini akan disampaikan temuan penelitian pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) di propinsi Sumatera Utara. Standarisasi isi pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, dari segi pengadaan, penjabaran dan mendokumentasikannya. Pada standar isi ini pemahaman tutor tentang kurikulum, silabus rencana pembelajaran, bahan ajar cukup baik bagi tutor yang tingkat pendidikannya sarjana, dan bagi tutor yang tingkat pendidikannya SLTA mereka kesulitan mengembangkan kurikulum berkaitan dengan silabus, menyusun rencana pembelajaran (RPP), dan pengembangan bahan ajar. Kemudian dalam hal pengadaan bahan ajar tutor mengalami kesulitan untuk menyusunnya, termasuk dalam pengadaan bahan ajar, karena terbatasnya dana. Pengelola belum dapat menyediakan dana untuk pengembangan bahan ajar dan penggandaannya. Sehubungan dengan itu timbul kendala berkaitan dengan motivasi warga belajar rendah untuk mengikuti kegiatan, karena kurang

tersedianya bahan ajar, dan modul untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Faktor penyebabnya sebagian warga belajar rendah kemampuannya, sehingga sulit memahami bahan ajar, warga belajar berasal dari tingkat ekonomi yang rendah dan sebagian mereka belum dapat melengkapi bahan belajar yang dapat memperlancar kegiatan pembelajaran. Khusus mengenai kesetaraan paket B dan C cukup diminati oleh warga belajar di daerah ini.

Motivasi warga belajar masih tergolong rendah, karena warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan ini mereka banyak yang bekerja sambil belajar, sehingga mereka sukar membagi waktu antara belajar dengan bekerja. Kemudian penyebab rendahnya motivasi warga belajar karena kemampuan mereka yang memang agak rendah dan pada umumnya yang menjadi sasaran pendidikan kesetaraan ini adalah mereka yang tidak lulus atau drop out pendidikan formal. Seorang yang mempunyai motivasi rendah dalam belajar secara langsung minatnya juga akan kurang untuk belajar. Menurut Dalyono (2007), seseorang yang mempunyai minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai/memperoleh sesuatu tujuan yang diminati. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat dan memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah. Kesulitan lain yang dirasakan tutor adalah sulitnya menuntaskan materi pembelajaran kepada warga belajar, karena kehadiran warga belajar yang tidak tetap (50%) misalnya hari ini mereka hadir, besok yang lain lagi hadir dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pengadaan modul sering terlambat datangnya dari pihak penyelenggara mulai dari tingkat propinsi, dan sering juga modul itu kurang (tidak cukup untuk WB).

Standarisasi proses pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan ketepatan, dan kesesuaian urgensi dalam perencanaan pembelajaran, memotivasi warga belajar, melaksanakan interaksi pembelajaran pelaksanaannya cukup baik. Interaksi pembelajaran antara tutor dan warga belajar berjalan cukup baik. Pemberian keterampilan kepada warga belajar belum berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam pembahasan materi, soal-soal ujian agak sulit dipahami warga belajar, karena keseriusan peserta yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran. Padahal menurut Hidayat (2017) program pembelajaran pada hakekatnya merupakan jawaban terhadap masalah belajar yang dihadapi oleh perorangan atau sekelompok orang (calon peserta belajar).

Sebagaimana diketahui bahwa sasaran pendidikan kesetaraan ini adalah warga belajar yang drop out pendidikan formal, dan ada juga warga belajar yang belum pernah memperoleh pendidikan formal. Berdasarkan kondisi seperti itu dari temuan diperoleh kemampuan warga belajar tergolong rendah, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memahami materi dan membahas soal-soal yang diberikan tutor. Sejalan dengan itu Dalyono (2007) menjelaskan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar adalah faktor psikologis, dan faktor tersebut termasuk kemampuan, emosi dan kesiapan seseorang dalam menghadapi kegiatan belajar.

Standarisasi kompetensi kelulusan (SKL), yang berkaitan dengan instrumen, penggunaan pedoman dan pelaksanaan kegiatan untuk mengukur standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya terdapat permasalahan, kesulitan yang terlihat adalah dalam rangka pencapaian ketuntasan belajar warga belajar. Kesulitan orientasi belajar warga belajar adalah memperoleh ijazah dan kehadiran mereka meningkat apabila mendekati ujian.

Standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman di bidang pendidikan nonformal. Tenaga pendidik direkrut dari tenaga guru yang honorer, pendidikan umumnya Strata I (SI), dan sedikit tutor direkrut dari mahasiswa. Tenaga tutor juga harus memiliki kompetensi pedagogi, yakni kemampuannya untuk memahami anak didik beserta karakteristiknya terampil memberikan bimbingan, mendidik anak. Kompetensi pedagogi ini temuan penelitian berada pada taraf baik. Selanjutnya kompetensi profesional berkaitan dengan keahliannya di bidang yang akan diajarkan, termasuk penguasaan materi ajar berada pada kategori cukup. Kompetensi sosial yakni kemampuan untuk bersosialisasi dengan warga belajar berada pada kategori baik, dalam hal ini pendidik/tutor sudah berupaya untuk mengembangkan sikap-sikap sosial. Kemudian temuan penelitian berkaitan dengan kompetensi kepribadian tutor berada pada kategori baik. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, tutor diberikan orientasi tentang strategi pembelajaran pada pendidikan nonformal. Permasalahan yang terlihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai lebih tinggi dari materi yang terdapat pada modul yang ada. Artinya modul yang disampaikan kepada peserta masih kurang lengkap dan belum mencakup keseluruhan materi yang seharusnya diterima peserta didik/warga belajar.

Keberhasilan seseorang dalam belajar ditentukan pula oleh faktor guru/tutor. Tutor diharapkan menguasai materi pembelajaran, dan diharapkan mereka juga memahami strategi pembelajaran, apalagi pada kegiatan pendidikan luar sekolah berbeda strategi menghadapi murid di sekolah dengan strategi tutor membimbing warga belajar di pendidikan kesetaraan. Aliasar (2004) mengemukakan bahwa tutor pada pendidikan luar sekolah harus dapat menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga warga belajar merasa betah untuk belajar dan diharapkan mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dipergunakan untuk kelangsungan hidupnya dalam masyarakat. Menurut Rahardjo & Suminar (2016), ada beberapa peran strategis yang dapat dimainkan oleh tutor dalam mengelola pembelajaran, yaitu (a) Mengelola kegiatan pembelajaran, tutor merencanakan tugas dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik dan penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua peserta didik mampu menunjukkan kemampuan atau mendemonstrasikan kinerjanya sebagai hasil belajar; (b) Mengelola lingkungan/tempat belajar, meliputi pengelolaan beberapa benda/objek yang ada dalam ruang belajar; (c) Mengelola peserta didik, yang perlu diperhitungkan adalah keberagaman peserta didik. Tutor dipersyaratkan memahami karakter yang berbeda-beda dari setiap peserta didik; (d) Mengelola isi atau materi pembelajaran, tutor menyiapkan rencana operasional kegiatan pembelajaran dalam wujud silabus terlebih dahulu.

Standarisasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan prasarana pendidikan, peralatan dan perlengkapan pendidikan serta buku, media dan sumber belajar pendidikan untuk pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada tempat/gedung yang cukup memadai/bagus, dan tempat yang digunakan pinjaman dari masyarakat setempat. Peralatan perlengkapan pendidikan seperti buku tulis cukup tersedia, tetapi yang dirasakan kurang adalah modul untuk warga belajar. Kemudian mengenai media pembelajaran tidak ada masalah bisa dipakai media yang ada pada pendidikan formal.

Lancar tidaknya kegiatan belajar ditentukan pula oleh prasarana dan sarana yang tersedia. Kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah di masyarakat seperti pendidikan kesetaraan ini pada umumnya dilaksanakan pada tempat yang ada saja seperti memakai gedung pendidikan formal yang ada. Inilah kondisi yang dihadapi pendidikan luar sekolah

kegiatan belajar sering dilaksanakan memakai gedung pinjaman, kadang memenuhi syarat dan tidak jarang pula gedung yang ditempati untuk belajar tidak memenuhi persyaratan untuk belajar. Dalam hal ini Sudjana (2001) menjelaskan daya dukung lain yang memungkinkan para warga belajar dapat melakukan kegiatan belajar dengan tersedianya fasilitas belajar termasuk tempat belajar yang memenuhi persyaratan sehingga menimbulkan kenyamanan dalam belajar. Lebih lanjut menurut Sanjaya (dalam Sutarto, 2010), terdapat keuntungan bagi penyelenggara pendidikan memiliki kelengkapan sarana prasarana pembelajaran, yaitu (a) dapat menumbuhkan gairah dan motivasi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan (b) dapat memberikan berbagai pilihan pada warga belajar untuk melakukan proses belajar.

Standarisasi pengelolaan yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Dalam hal pengelolaan seperti di atas cukup berjalan dengan lancar tidak terlihat permasalahan yang berarti. Kelancaran pelaksanaan pendidikan luar sekolah ditentukan pula oleh pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pengelola, dalam hal ini keseriusan pengelola sangat diharapkan. Kenyataan ditemui kadang pengelola terkesan kurang serius dalam mengelola kegiatan pembelajaran pendidikan luar sekolah.

Standarisasi pembiayaan, berkaitan dengan sumber pembiayaan, distribusi, penggunaan, pertanggungjawaban dan pembukuan serta dokumennya. Dalam pelaksanaannya sumber pembiayaan dari direktur pendidikan masyarakat, dirasakan masih kurang. Hal ini dapat dirasakan dalam penyelenggaraan pada pendidikan kesetaraan, baik untuk dana dalam poses pembelajaran, gaji tenaga pendidik, penyediaan fasilitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran penyediaan dana untuk kelengkapan fasilitas pendidikan belum dapat diadakan, seperti pembelian buku-buku sumber belajar, modul-modul yang digunakan belum dapat diadakan. Kemudian tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan belum dapat digaji sesuai standar tenaga pendidik pada pendidikan formal/sekolah. Ketertinggalan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini dirasakan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan. Dana bantuan seperti dana BOS pada pendidikan formal belum ada pada pendidikan luar sekolah, dan dana pendukung lainnya dirasakan masih kurang. Lebih lanjut menurut Kurniawati (2017) harga adalah faktor yang paling memengaruhi keputusan pemilihan program kejar paket. Kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan memilih tempat pendidikan yang sesuai dengan kelasnya, di tempat yang khusus dan memiliki biaya yang cukup mahal sesuai, dan sebaliknya.

Standar penilaian yang berkaitan dengan panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian, standarisasi penilaian, dokumentasi dan sosialisasinya. Mengenai panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian ada panduannya, tetapi yang menjadi masalah standar penilaian kepada peserta didik/warga belajar tinggi sama dengan pendidikan formal untuk jenjang SD, SLTP maupun jenjang SLTA. Sementara ketersediaan bahan belajar, modul untuk peserta didik pendidikan kesetaraan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Kemudian tuntutan untuk penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan kesetaraan sangat tinggi. Berdasarkan kondisi itu kegiatan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan ini belum dapat berjalan dengan lancar sehingga pendidikan kesetaraan ini belum dapat berfungsi secara maksimal sebagai pengganti pendidikan formal.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) di Sumatra Barat berdasarkan 8 standar pendidikan sebagai berikut: Standarisasi isi pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar,

dari segi pengadaan, penjabaran dan mendokumentasikannya. Pada standar isi ini pemahaman tutor tentang kurikulum masih kurang, sehingga kesulitan dalam menyusun silabus rencana pembelajaran, memahami bahan ajar cukup baik. Kendala yang ada tentang motivasi warga belajar rendah Faktor penyebabnya sebagian warga belajar rendah kemampuannya, sehingga sulit memahami bahan ajar, warga belajar berasal dari tingkat ekonomi yang rendah dan sebagian mereka ada yang bekerja sambil belajar.

Kesulitan lain yang dirasakan tutor adalah sulitnya menuntaskan materi pembelajaran kepada warga belajar, karena kehadiran warga belajar yang tidak tetap (50%) misalnya hari ini mereka hadir, besok yang lain lagi hadir dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi disebabkan dari kondisi peserta didik/warga belajar pendidikan kesetaraan ini mereka disibukkan dengan pekerjaan yang harus dilakukannya untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kegiatan belajar bagi mereka hanya berupa kegiatan sambilan saja. Warga belajar kurang serius untuk melakukan kegiatan belajar hal ini disebabkan karena masalah ekonomi. Kemudian dalam pengadaan modul sering terlambat datangnya dari pihak penyelenggara mulai dari tingkat propinsi, dan sering juga modul itu kurang (tidak cukup untuk WB).

Standarisasi proses pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan ketepatan, dan kesesuaian urgensi dalam perencanaan pembelajaran, memotivasi warga belajar, melaksanakan interaksi pembelajaran, evaluasi dan supervisi pembelajaran. Pelaksanaan standar ini masih pada taraf cukup. Interaksi pembelajaran antara tutor dan warga belajar berjalan cukup baik. Pemberian keterampilan kepada warga belajar agak kurang berjalan. Pelatihan keterampilan kepada peserta didik belum dapat dilakukan secara baik, dalam hal ini memerlukan dana untuk melatih peserta, serta peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pembahasan materi, soal-soal ujian agak sulit dipahami warga belajar, karena kegiatan pembelajaran belum dilakukan secara maksimal, masih kurang buku-buku sumber serta modul yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran juga masih kurang. Padahal menurut Hidayat (2017) program pembelajaran pada hakekatnya merupakan jawaban terhadap masalah belajar yang dihadapi oleh perorangan atau sekelompok orang (calon peserta belajar).

Standarisasi kompetensi kelulusan (SKL), yang berkaitan dengan instrumen, penggunaan pedoman dan pelaksanaan kegiatan untuk mengukur standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ada masalah, kesulitan yang terlihat adalah dalam rangka pencapaian ketuntasan belajar warga belajar.

Standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman di bidang pendidikan nonformal. Tenaga pendidik direkrut dari tenaga guru yang honorer, pendidikan umumnya Strata I (SI), dan ada tutor direkrut dari tamatan SLTA. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, tutor diberikan orientasi tentang strategi pembelajaran pada pendidikan nonformal, namun demikian pelatihan tutor belum tuntas permasalahan yang terlihat kompetensi yang akan dicapai lebih tinggi dari materi yang terdapat pada modul yang ada. Untuk itu menurut Rahardjo & Suminar (2016), perlu adanya beberapa peran strategis tutor yang dapat dimainkan oleh tutor dalam mengelola pembelajaran, yaitu (a) Mengelola kegiatan pembelajaran, tutor merencanakan tugas dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik dan penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua peserta didik mampu menunjukkan kemampuan atau mendemonstrasikan kinerjanya sebagai hasil belajar; (b) Mengelola lingkungan/tempat belajar, meliputi pengelolaan beberapa benda/objek yang ada dalam ruang belajar; (c)

Mengelola peserta didik, yang perlu diperhitungkan adalah keberagaman peserta didik. Tutor dipersyaratkan memahami karakter yang berbeda-beda dari setiap peserta didik; (d) Mengelola isi atau materi pembelajaran, tutor menyiapkan rencana operasional kegiatan pembelajaran dalam wujud silabus terlebih dahulu.

Standarisasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan prasarana pendidikan, peralatan dan perlengkapan pendidikan serta buku, media dan sumber belajar pendidikan untuk pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada tempat/gedung yang cukup memadai, dan tempat yang digunakan pinjaman dari masyarakat setempat. Peralatan perlengkapan pendidikan seperti buku tulis cukup tersedia, tetapi yang dirasakan kurang adalah modul untuk warga belajar. Kemudian mengenai media pembelajaran tidak ada masalah bisa dipakai media yang ada pada pendidikan formal. Lebih lanjut menurut Sanjaya (dalam Sutarto, 2010), terdapat keuntungan bagi penyelenggara pendidikan memiliki kelengkapan sarana prasarana pembelajaran, yaitu (a) dapat menumbuhkan gairah dan motivasi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan (b) dapat memberikan berbagai pilihan pada warga belajar untuk melakukan proses belajar.

Standarisasi pengelolaan yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Dalam hal pengelolaan seperti di atas terlihat pengelola kadang kurang serius menyelenggarakan kegiatan paket A, B, Dan C. Rencana kerja yang disusun pengelola, dalam pelaksanaannya menemukan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Standarisasi pembiayaan, berkaitan dengan sumber pembiayaan, distribusi, penggunaan, pertanggungjawaban dan pembukuan serta dokumennya. Dalam pelaksanaannya sumber pembiayaan dari direktur pendidikan masyarakat, dirasakan masih kurang dan terkadang pengelolaan pembiayaan belum transparan. Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dirasakan masih kurang. Sumber pembiayaan diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan masyarakat. Dana bantuan seperti dana BOS pada pendidikan formal belum ada pada pendidikan luar sekolah. Lebih lanjut menurut Kurniawati (2017) harga adalah faktor yang paling memengaruhi keputusan pemilihan program kejar paket. Kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan memilih tempat pendidikan yang sesuai dengan kelasnya, di tempat yang khusus dan memiliki biaya yang cukup mahal sesuai, dan sebaliknya.

Standar penilaian yang berkaitan dengan panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian, standarisasi penilaian, dokumentasi dan sosialisasinya. Mengenai panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian ada panduannya, tetapi yang menjadi masalah standar penilaian tinggi jika dibandingkan dengan modul dan bahan ajar yang tersedia. Modul dan bahan ajar dikirim untuk peserta belum mencukupi untuk seluruh peserta. Dengan demikian Peserta/warga belajar sulit memperoleh hasil belajar yang tinggi.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C) di Sumatra Selatan berdasarkan 8 standar pendidikan sebagai berikut: Standarisasi isi pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, dari segi pengadaan, penjabaran dan mendokumentasikannya. Pada standar isi ini pemahaman tutor tentang kurikulum masih kurang, sehingga kesulitan dalam menyusun silabus rencana pembelajaran, memahami bahan ajar cukup baik. Kendala yang ada tentang motivasi warga belajar rendah. Faktor penyebabnya sebagian warga belajar rendah

kemampuannya, sehingga sulit memahami bahan ajar, warga belajar berasal dari tingkat ekonomi yang rendah dan sebagian mereka ada yang bekerja sambil belajar. Menurut Kurniawati (2017) harga adalah faktor yang paling memengaruhi keputusan pemilihan program kejar paket. Kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan memilih tempat pendidikan yang sesuai dengan kelasnya, di tempat yang khusus dan memiliki biaya yang cukup mahal sesuai, dan sebaliknya. Kemudian warga belajar pada tempat yang berjauhan mengingat luasnya Propinsi Sumatera Selatan.

Kesulitan lain yang dirasakan tutor adalah sulitnya menuntaskan materi pembelajaran kepada warga belajar, karena kehadiran warga belajar yang tidak tetap di bawah (60%) misalnya hari ini mereka hadir, besok yang lain lagi hadir dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam pengadaan modul sering terlambat datangnya dari pihak penyelenggara mulai dari tingkat propinsi, dan sering juga modul itu kurang (tidak cukup untuk WB). Untuk mengatasi hal tersebut menurut Rahardjo & Suminar (2016), ada beberapa peran strategis tutor yang dapat dimainkan oleh tutor dalam mengelola pembelajaran, yaitu (a) Mengelola kegiatan pembelajaran, tutor merencanakan tugas dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik dan penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua peserta didik mampu menunjukkan kemampuan atau mendemonstrasikan kinerjanya sebagai hasil belajar; (b) Mengelola lingkungan/tempat belajar, meliputi pengelolaan beberapa benda/objek yang ada dalam ruang belajar; (c) Mengelola peserta didik, yang perlu diperhitungkan adalah keberagaman peserta didik. Tutor dipersyaratkan memahami karakter yang berbeda-beda dari setiap peserta didik; (d) Mengelola isi atau materi pembelajaran, tutor menyiapkan rencana operasional kegiatan pembelajaran dalam wujud silabus terlebih dahulu.

Standarisasi proses pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan ketepatan, dan kesesuaian urgensi dalam perencanaan pembelajaran, memotivasi warga belajar, melaksanakan interaksi pembelajaran, evaluasi dan supervisi pembelajaran. Pelaksanaan standar ini cukup baik Interaksi pembelajaran antara tutor dan warga belajar berjalan cukup baik. Pemberian keterampilan kepada warga belajar agak kurang berjalan, karena sulitnya untuk memberi honor tenaga pelatih keterampilan. Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam pemabahasan materi, soal-soal ujian agak sulit dipahami warga belajar, karena keseriusan peserta masih kurang. Minat peserta masih kurang, hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta mengikuti kegiatan pembelajaran. Padahal menurut Hidayat (2017) program pembelajaran pada hakekatnya merupakan jawaban terhadap masalah belajar yang dihadapi oleh perorangan atau sekelompok orang (calon peserta belajar).

Standarisasi kompetensi kelulusan (SKL), yang berkaitan dengan instrument, penggunaan pedoman dan pelaksanaan kegiatan untuk mengukur standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya adalah masalah, kesulitan yang terlihat adalah dalam rangka pencapaian ketuntasan belajar warga belajar. Hasil belajar yang diperoleh peserta masih kurang, karena keseriusan dan kehadiran warga belajar masih rendah. Kehadiran peserta meningkat apabila mendekati ujian dilaksanakan. Standar kompetensi lulusan terlalu tinggi, dan sulit dicapai secara baik oleh peserta.

Standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kompetensi, pendidikan, dan pengalaman di bidang pendidikan nonformal. Tenaga pendidik direkrut dari tenaga guru yang honorer dan pendidikannya sebagian SI, dan ada juga tutor yang direkrut dari mereka yang mau dan mampu. Permasalahan yang terjadi pada tenaga pendidik luar sekolah di antaranya belum adanya standar gaji/honor yang jelas seperti tenaga pendidik pada pendidikan formal/sekolah, sehingga motivasi pendidik luar sekolah rendah untuk

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, tutor diberikan orientasi tentang strategi pembelajaran pada pendidikan nonformal, namun demikian pelatihan tutor belum tuntas Permasalahan yang terlihat kompetensi yang akan dicapai lebih tinggi dari materi yang terdapat pada modul yang ada

Standarisasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan prasarana pendidikan, peralatan dan perlengkapan pendidikan serta buku, media dan sumber belajar pendidikan untuk pendidikan pengetahuan umum dan pendidikan keterampilan. Pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada tempat/gedung yang cukup memadai, dan tempat yang digunakan pinjaman dari masyarakat setempat. Peralatan perlengkapan pendidikan seperti buku tulis cukup tersedia, tetapi yang dirasakan kurang adalah modul untuk warga belajar, serta sumber-sumber buku yang mendukung kegiatan belajar juga kurang. Kemudian berkaitan dengan bahan-bahan praktik pada kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan sangat dirasakan masih kurang, dan bahkan boleh dijelaskan bahwa kegiatan praktik di laboratorium sangat kurang. Kemudian mengenai media pembelajaran digunakan media yang ada pada pendidikan formal, karena belum ada media yang dilengkapi khusus untuk kegiatan pembelajaran di luar sekolah untuk pendidikan kesetaraan. Lebih lanjut menurut Sanjaya (dalam Sutarto, 2010), terdapat keuntungan bagi penyelenggara pendidikan memiliki kelengkapan sarana prasarana pembelajaran, yaitu (a) dapat menumbuhkan gairah dan motivasi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan (b) dapat memberikan berbagai pilihan pada warga belajar untuk melakukan proses belajar.

Standarisasi pengelolaan yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan dan system informasi manajemen. Dalam hal pengelolaan terkadang terlihat pengelola kurang serius, sehingga kegiatan pembelajaran kurang berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan dari pihak pengelola, pelaksana belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi program kesetaraan kepada masyarakat dirasakan masih kurang.

Standarisasi pembiayaan, berkaitan dengan sumber pembiayaan, distribusi, penggunaan, pertanggungjawaban dan pembukuan serta dokumennya. Dalam pelaksanaannya sumber pembiayaan dari direktur pendidikan masyarakat, dirasakan belum cukup. Dana yang ada belum dapat menyediakan fasilitas pembelajaran seperti melengkapi modul-modul untuk peserta agar dapat dipergunakan secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan keuangan sudah mulai transparan. Dana bantuan seperti dana BOS pada pendidikan formal belum ada. Lebih lanjut menurut Kurniawati (2017) harga adalah faktor yang paling memengaruhi keputusan pemilihan program kejar paket. Kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan memilih tempat pendidikan yang sesuai dengan kelasnya, di tempat yang khusus dan memiliki biaya yang cukup mahal sesuai, dan sebaliknya.

Standar penilaian yang berkaitan dengan panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian, standarisasi penilaian, dokumentasi dan sosialisasinya. Mengenai panduan penilaian, proses dan prosedur penilaian ada panduannya. Standar penilaiannya yang akan dicapai tinggi, yang menjadi masalah kegiatan pembelajaran belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, sehingga tujuan yang sudah dirumuskan dalam standar penilaian belum dapat dicapai. Kemudian mencermati modul yang dikirim ke kelompok belajar masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Modul yang ada belum lengkap untuk dijadikan bahan belajar bagi peserta didik, sehingga kemampuan peserta didik belum dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Indonesia sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan, sebagai berikut 1) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C), berdasarkan temuan penelitian, wilayah Sumatera Utara termasuk kategori berhasil dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya berdasarkan 8 standar pendidikan namun demikian masih ditemui kesulitan; 2) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C), berdasarkan temuan penelitian wilayah Sumatera Barat termasuk kategori cukup dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya berdasarkan 8 standar pendidikan, namun demikian masih ditemui kesulitan; 3) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (A, B, dan C), berdasarkan temuan penelitian wilayah Sumatera Selatan termasuk kategori kurang berhasil dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya berdasarkan 8 standar pendidikan, namun demikian masih ditemui kesulitan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aliasar. (2004). *Bahan Ajar Andragogi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Dalyono. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, D. (2017). Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan Masyarakat Program Kejar Paket C. *Journal of Nonformal Education*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/jne.v3i1.8727>
- Kintamani, I. D. H. (2012). Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84. Retrieved from <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/download/70/67>
- Kurniawati, M. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Program Kejar Paket. In *Conference on Management and Behavioral Studies* (pp. 128–137). Jakarta: Universitas Tarumanagara. Retrieved from <http://cmbs.untar.ac.id/images/prosiding/2017/Meike-Kurniawati.pdf>
- Muljono, P. (2008). Urgensi Standarisasi Proses Pendidikan Kesetaraan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(073), 653–663. Retrieved from [https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/34273/1/KPMPjm-JPK147308-Urgensi standarisasi.pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/34273/1/KPMPjm-JPK147308-Urgensi%20standarisasi.pdf)
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Rahardjo, T. J., & Suminar, T. (2016). Penerapan Pedagogi dan Andragogi pada Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A, B, Dan C di Kota Semarang. *Edukasi*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/download/954/891>
- Sudjana, D. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*. Bandung: Falah Production.
- Sutarto, J. (2010). Determinan Mutu Proses dan Hasil Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(3), 210–217. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/106288-ID-determinan-mutu-proses-dan-hasil-pembela.pdf>